



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 102 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 16 /KEP/BPP/2026
TENTANG PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI
PADANG PARIAMAN TAHUN 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang efektif dan efisien, diperlukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa untuk itu, perlu dilakukan perubahan perencanaan penyusunan peraturan Bupati guna mengakomodir berbagai aspek yang belum diatur dalam peraturan yang telah ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 16 /KEP/BPP/2026 tentang Tambahan Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Padang Pariaman Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKU ¹⁵	

Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);

8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 16 /KEP/BPP/2025 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Padang Pariaman Tahun 2026.
KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merubah Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.
KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 9 April 2026



BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang; dan
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 102 /KEP/BPP/2026
 TANGGAL 9 APRIL 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 NOMOR 16/KEP/BPP/2026 TENTANG
 PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN
 BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2026

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
1.	SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
2.	PEMBERIAN BEASISWA BAGI PEMUDA BERPRESTASI	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
3.	BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.	RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025-2029	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJA SAMA SEKRETARIAT DAERAH
5.	SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
6.	TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
7.	PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
8.	PENCATATAN DAN PEMBAGIAN LOKASI DANA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2027	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
9.	PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN 2027	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
10.	PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

11.	TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
12.	PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
13.	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
14.	RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DAN USIA KURANG DARI 19 TAHUN	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
15.	RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI TAHUN 2025-2029	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
16.	PELAKSANAAN KEPROTOKOLERAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH
17.	PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
18.	SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
19.	PEDOMAN ALIH MEDIA ARSIP	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
20.	PENYELENGGARAAN KOPERASI NAGARI MERAH PUTIH	DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
21.	REKAMERANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS DAN UNIT PELAKSANA DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
22.	KAMPANYE HIGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM	DINAS KESEHATAN
23.	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
24.	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
25.	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

26.	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
27.	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
28.	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
29.	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
30.	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
31.	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
32.	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
33.	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
34.	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
35.	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
36.	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
37.	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
38.	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

39.	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
40.	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
41.	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
42.	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
43.	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
44.	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
45.	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
46.	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
47.	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
48.	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
49.	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
50.	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
51.	KELAS JABATAN LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

52.	PENGELOLAAN PENGADUAN	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
53.	PEMBENTUKAN 3 (TIGA) NAGARI PERSIAPAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
54.	BATAS NAGARI BALAH AIE UTARA KECAMATAN VII KOTO	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
55.	BATAS NAGARI LAREH NAN PANJANG SUNGAI SARIAK KECAMATAN VII KOTO	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
56.	BATAS NAGARI BISATI SUNGAI SARIAK KECAMATAN VII KOTO	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
57.	BATAS NAGARI SEULAYAT ULAKAN KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
58.	BATAS NAGARI KAMPUANG GALAPUANG ULAKAN KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
59.	BATAS NAGARI TOBOH GADANG TIMUR KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
60.	BATAS NAGARI SUNUA BARAT KECAMATAN NAN SABARIS	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
61.	BATAS NAGARI SUNUA TENGAH KECAMATAN NAN SABARIS	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
62.	BATAS NAGARI TOBOH GADANG BARAT KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
63.	BATAS NAGARI BALAH AIE TIMUR KECAMATAN VII KOTO	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
64.	BATAS NAGARI MANGGOPOH PALAK GADANG ULAKAN KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
65.	BATAS NAGARI SANDI ULAKAN KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
66.	BATAS NAGARI PADANG TOBOH ULAKAN KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
67.	BATAS NAGARI SUNGAI BULUAH BARAT KECAMATAN BATANG ANAI	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
68.	BATAS NAGARI SUNGAI GIMBA ULAKAN KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
69.	BATAS NAGARI LIMPATO SUNGAI SARIAK KECAMATAN VII KOTO	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
70.	BATAS NAGARI KATAPIANG KECAMATAN BATANG ANAI	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
71.	BATAS NAGARI KASANG KECAMATAN BATANG ANAI	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

72.	BATAS NAGARI TOBOH GADANG SELATAN KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
73.	BATAS NAGARI ULAKAN KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
74.	BATAS NAGARI PAUH KAMBAR KECAMATAN NAN SABARIS	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
75.	BATAS NAGARI TOBOH GADANG KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
76.	BATAS NAGARI SUNGAI ASAM KECAMATAN 2 X 11 ENAM LINGKUNG	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
77.	BATAS NAGARI LUBUK PANDAN KECAMATAN 2 X 11 ENAM LINGKUNG	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
78.	BATAS NAGARI KOTO TINGGI KECAMATAN ENAM LINGKUNG	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
79.	BATAS NAGARI KAMPUANG TANJUANG KOTO MAMBANG SUNGAI DURIAN KECAMATAN VII KOTO PATAMUAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
80.	PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN 2027	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
81.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN NAGARI	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
82.	PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2027	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
83.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2026	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
84.	TARIF PENGGUNAAN RUANGAN/LAHAN PADA LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADANG PARIAMAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
85.	PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADANG PARIAMAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
86.	PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



87.	PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
88.	TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
89.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
90.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADANG PARIAMAN	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
91.	PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN



BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS